

Dampak Akreditasi Terhadap Kualitas Pengelolaan Lembaga Kursus Dan Pelatihan

Muhammad Ali Latif

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

Email: alilatif_amri@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran kualitas pengelolaan lembaga Kursus dan pelatihan setelah mendapatkan status terakreditasi di Sulawesi Selatan; mengidentifikasi faktor pendukung lembaga Kursus dan pelatihan terakreditasi; dan mengidentifikasi faktor penghambat lembaga Kursus dan pelatihan terakreditasi dalam meningkatkan kualitasnya. Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, disimpulkan (1) terdapat peningkatan kualitas pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mendapat status terakreditasi tahun 2017; (2) mendapat dukungan (a) motivasi dan semangat pengelola; (b) bertambahnya tenaga pendidik; (c) bertambahnya sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan; (d) meningkatnya kompetensi pengelola; (e) bertambahnya frekuensi pertemuan dalam membahas permasalahan dan pengembangan lembaga kursus dan pelatihan; (f) dukungan biaya dari pemerintah; (g) bertambahnya lembaga kerjasama/kemitraan; dan (h) bertambahnya peserta dalam kegiatan pembelajaran/pelatihan. (3) mendapat hambatan dari (a) kekurangan tenaga pendidik profesional sesuai kebutuhan; (b) kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan; (c) kekurangan pembiayaan untuk mendukung biaya operasional dan insentif tenaga pendidik; (d) belum ada usaha produktif (e) keterlambatan dukungan pembiayaan dari pemerintah saat dibutuhkan untuk mendukung program pembelajaran/pelatihan; (f) banyaknya saingan lembaga kursus yang sama; dan (g) sulitnya menjalin lembaga mitra/kerjasama.

Kata kunci: dampak, kualitas, kursus dan pelatihan

Abstract. The study aims to get a picture of the quality of the management of the course and training institutions after getting accredited status in South Sulawesi; identifying factors supporting accredited Course and training institutions; and identifying factors that hamper accredited institutions. Courses and training in improving their quality. This research includes evaluation research, using a quantitative descriptive approach. Based on the results of research and data analysis, it was concluded (1) there was an improvement in the quality of the management of the Course and Training institutions in the Province of South Sulawesi which had been accredited in 2017; (2) get support (a) motivation and enthusiasm of the manager; (b) increasing teaching staff; (c) increasing learning / training facilities and infrastructure; (d) increasing managerial potential; (e) increasing frequency of meetings in discussing issues and developing courses and training institutions; (f) financial support from the government; (g) increasing cooperation / partnership institutions; and (h) increasing participants in learning/training activities. (3) there are obstacles from (a) lack of professional teaching staff as needed; (b) lack of learning/training facilities and infrastructure; (c) lack of funding to support operational costs and teacher incentives; (d) there has been no productive effort (e) the delay in funding support from the government when needed to support the learning / training program; (f) the number of competitors in the same course; and (g) the difficulty of establishing partner/collaboration institutions.

Keywords: impact, quality, courses and training

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan itu berlangsung dalam tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Khusus untuk jalur pendidikan nonformal, yang

diatur, diorganisir, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal (sekolah), telah diselenggarakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan nonformal seperti Pendidikan Anak Usia Dini, lembaga Kursus dan Pelatihan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Setiap satuan pendidikan

yang dimaksud, terdapat sejumlah program pembelajaran.

Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal dalam lembaga kursus dan pelatihan telah banyak mendatangkan manfaat dalam melayani kebutuhan belajar warga masyarakat. Keberadaan satuan/program lembaga kursus dan pelatihan diakui telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kursus dan pelatihan dari berbagai rumpun kebahasaan, dan keterampilan/keahlian.

Lembaga kursus dan pelatihan, menjadikan satuan pendidikan ini penting, karena dapat melayani kebutuhan belajar warga masyarakat mulai dari anak usia dini hingga lanjut usia. Dalam perjalanan lembaga Kursus dan pelatihan dalam melayani kebutuhan belajar masyarakat, tentunya ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, bahkan ada yang gagal mencapai tujuan membelajarkan dan mencapai luaran pendidikan yang berkualitas

Akreditasi yang merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk menentukan mengenai kualitas lembaga pendidikan, dengan menggunakan ukuran-ukuran standar yang telah ditetapkan, akan menentukan peringkat kualitas satuan/program pendidikan yang dinilai, apakah peringkat A, peringkat B, atau peringkat C.

Di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 terdapat 34 lembaga kursus dan pelatihan yang diproses akreditasi dan telah memperoleh status terakreditasi, dengan prolehian peringkat A ada 2 lembaga, peringkat B ada 27 lembaga, dan peringkat C ada 5 lembaga (BAN PAUD dan PNF, 2017). Dari data ini memperlihatkan bahwa kualitas lembaga Kursus dan pelatihan di Sulawesi Selatan masih memperhatikan, karena dari 34 lembaga yang sudah memperoleh status terakreditasi hanya 2 lembaga yang memperoleh akreditasi A atau sangat baik, sedangkan sisanya masih memerlukan pembenahan dan peningkatan kualitas secepatnya. Bagi yang terakreditasi A tentunya dapat mempertahankan kualitasnya agar jangan sampai pada saat akreditasi selanjutnya status akreditasinya menurun.

Standar Nasional Pendidikan memang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Standar tersebut terdiri dari delapan point atau variabel yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan yang berada di Indonesia. Delapan Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian (PP no.19/2005 dan PP no.13/2015).

Fungsi dari standar nasional pendidikan ini adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sementara itu Standar nasional pendidikan ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peradaban serta watak bangsa yang bermartabat.

Melalui akreditasi diharapkan lembaga Kursus dan pelatihan yang sudah terakreditasi sudah mengenali kualitas dan kondisi lembaganya, sehingga berusaha untuk memperbaiki indikator dari standar yang kurang atau perlu dilengkapi. Pengelola satuan/program pendidikan tidak hanya puas dengan capaian peringkat akreditasi yang telah diperoleh, tetapi diharapkan berusaha untuk melengkapi atau meningkatkan keadaan, kesesuaian, dan kelayakannya berdasarkan ukuran standar nasional pendidikan..

Sebagian pengelola satuan/program lembaga Kursus dan pelatihan pada pendidikan nonformal, mengikuti proses akreditasi, hanya ingin menggugurkan kewajiban dari pemerintah, dimana pemerintah dengan kebijakan yang ada kurang membuka akses dalam memperoleh bantuan sarana dan prasarana pendidikan jika lembaga Kursus dan pelatihan tidak terakreditasi.

Di pihak lain, ada pengelola satuan/program lembaga Kursus dan pelatihan setelah mendapatkan peringkat akreditasi, maka berusaha

sekuat tenaga untuk mempertahankan/memelihara indikator penilaian yang sudah baik, dan meningkatkan/mengembangkan indikator penilaian yang belum baik atau yang belum sempurna,

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu dikaji lebih mendalam melalui penelitian, agar dapat diungkapkan secara jelas, mengenai dampak akreditasi terhadap kualitas pengelolaan lembaga Kursus dan pelatihan setelah memperoleh status akreditasi, apakah kualitas yang menyertai status tersebut mampu dipertahankan atau ditingkatkan, atau menurun.. Selain itu, juga akan diungkapkan mengenai factor pendukung dan penghambat bagi lembaga Kursus dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas pengelolannya setelah memperoleh peringkat akreditasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pembenahan dan peningkatan pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengambil populasi 34 lembaga kursus dan pelatihan yang sudah mendapat status terakreditasi sejak tahun 2017 sebagai subjek (sasaran) penelitian. Instrumen yang dipakai dalam pengumpulan data: (1) questionnaire, digunakan untuk mendapatkan data/informasi tentang kondisi riil pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan, (2) Pedoman wawancara, digunakan untuk mendapatkan data/informasi yang berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan Instrumen yang digunakan mengadaptasi instrument yang dipakai oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)

Metode analisis data untuk kualitas pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan dengan

membandingkan nilai kualitas pengelolaan yang diperoleh saat mendapatkan status akreditasi tahun 2017, dengan nilai kualitas pengelolaan yang diperoleh saat penelitian. dilakukan dengan cara membuat rerata dari nilai semua item pertanyaan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kecenderungan rerata yang paling banyak/tinggi yang diperoleh. Sedangkan data mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan dianalisis dengan cara: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat peningkatan kualitas pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan saat awal mendapatkan status terakreditasi di tahun 2017, dibandingkan dengan capaian kualitas pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan saat ini (tahun 2019).

Peningkatan kualitas lembaga Kursus dan Pelatihan ini ditandai oleh semakin baiknya pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola, yang ditandai adanya motivasi dan semangat yang lebih baik dan terukur yang dilakukan.

Kualitas pengelolaan pendidikan ditentukan oleh kemampuan pengelola lembaga pendidikan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, baik manusia maupun non manusia, dan mampu mengurangi atau menghilangkan kendala-kendala yang dialami selama proses pegelolaan lembaga pendidikan, hingga mencapai tujuan menghasilkan manusia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan hasil belajarnya (Sihombing, 2000).

Kualitas pengelolan suatu lembaga pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat atau kendala. Dari faktor pendukung dan penghambat tersebut, terdapat aspek yang terkait dengan internal dan eksternal,

Faktor pendukung dalam pengelolaan pendidikan nonfomal di lembaga Kursus dan Pelatihan yang bersifat internal meliputi (1)

motivasi dan semangat semua unsur dalam LKP untuk lebih baik dari kondisi yang mereka alami saat akreditasi, (2) bertambahnya tenaga pendidik, (3) bertambahnya sarana dan prasarana, (4) meningkatnya kompetensi pengelola dengan mengikuti berbagai pelatihan/ workshop, dan (5) bertambahnya frekuensi pertemuan antara pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk membahas permasalahan dan pengembangan LKP.

Jika ditelusuri lebih jauh nampaknya bahwa motivasi dan semangat para pengelola harus lebih ditingkatkan. Dorongan para pengelola untuk meningkatkan pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan bisa datangnya dari dalam individu para pengelolanya, seperti kejenuhan dengan rutinitas dan kemauan dari individu pengelola untuk lebih baik, dapat juga motivasi itu dipengaruhi dari luar, seperti kondisi peringkat akreditasi yang diperolehnya masih rendah (misalnya peringkat akreditasi C atau B), dengan kondisi tersebut para pengelola lembaga Kursus dan Pelatihan berusaha sekuat tenaga agar akreditasi berikutnya peringkat yang diperoleh dapat meningkat. Membandingkan lembaga Kursus dan Pelatihan yang dikelolanya dengan lembaga Kursus yang dikelola oleh orang lain, nampaknya menjadi daya dorong tersendiri untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai lebih baik dari sebelumnya.

Faktor internal yang *kedua* yang menjadi pendukung adalah bertambahnya tenaga pendidik. Tenaga Pendidik sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan Kursus dan Pelatihan, karena keberadaan tenaga pendidik (pelatih, instruktur, pembimbing, tutor) tentunya akan memberikan daya dukung dari segi sumberdaya manusia. Para pendidik dapat dimanfaatkan untuk melakukan tugas-tugas yang terkait dengan mendidik/mengajar, namun juga dapat digunakan sebagai tenaga pendukung dalam pengelolaan lembaga Kursus dan pelatihan. Pada kebanyakan lembaga Kursus dan Pelatihan yang ada, tenaga pendidik memiliki tugas ganda sebagai pengelola lembaga pendidikan, khususnya yang terkait

dengan pengelolaan administrasi pembelajaran dan administrasi penilaian pendidikan/pembelajaran.

Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga pendidik yang profesional di bidangnya untuk memenuhi tuntutan berkembangnya lembaga Kursus dan Pelatihan untuk menyelenggarakan program pembelajaran, selain yang sudah ada pada saat diakreditasi tahun 2017, disebabkan karena program pembelajaran yang di selenggarakan selama ini diperluas jangkauannya dengan membuka satu cabang atau beberapa cabang, dibawah pengelolaan lembaga Kursus yang sudah terakreditasi. Kondisi seperti yang telah dijelaskan, akan membawa konsekuensi kepada pengelola lembaga Kursus yang telah terakreditasi untuk semakin meningkatkan pengelolaan lembaga pendidikannya..

Faktor internal yang *ketiga* yang menjadi pendukung adalah bertambahnya sarana dan prasarana pendidikan/pembelajaran. Sarana adalah segala sesuatu (benda) yang dapat mendukung secara langsung terselenggaranya proses pembelajaran, seperti bahan belajar, papan tulis (white board), spidol, peralatan pelatihan/praktek, LCD, dan laptop. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu (benda) yang dapat mendukung terselenggaranya proses pembelajaran seperti ruang kelas, ruang praktek, laboratorium, perpustakaan, gedung, toilet, dan tempat sampah. Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana pembelajaran/pendidikan di lembaga Kursus dan Pelatihan menjadi indikator perkembangannya lembaga Kursus dan pelatihan tersebut, tentunya harus diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaannya. Karena sarana dan prasarana harus dikelola dengan dan professional, untuk menjamin terpeliharanya dan terjaminnya penggunaan sesuai peruntukannya.

Faktor internal yang *keempat* yang menjadi pendukung adalah meningkatnya kompetensi pengelola dengan mengikuti berbagai pelatihan/ workshop. Upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh para pengelola lembaga Kursus dan Pelatihan dengan cara mengikuti berbagai

pelatihan/workshop, terutama yang berkaitan dengan manajemen. Pelatihan yang pernah diikuti antara lain pelatihan manajemen LKP yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sulawesi Selatan, dan workshop yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengelola Kursus dan Pelatihan Indonesia (HIPKI) Provinsi Sulawesi Selatan. Meningkatnya kompetensi pengelola Kursus dan Pelatihan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan Kursus dan Pelatihan yang dikelolanya.

Faktor internal yang *kelima* yang menjadi pendukung adalah bertambahnya frekuensi pertemuan antara pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk membahas permasalahan dan pengembangan LKP. Berbagai permasalahan yang muncul kepermukaan saat menjalankan tugas mengelola lembaga Kursus dan Pelatihan akan mudah diatasi jika semua unsur dalam lembaga tersebut senantiasa melakukan pertemuan untuk mendiskusikan solusi permasalahan dan pengembangan lembaga Kursus dan Pelatihan ke depan. Permasalahan akan lebih mudah ditemukan pemecahannya jika didiskusikan, dari pada diputuskan sendiri. Oleh sebab itu semakin banyak melakukan pertemuan dengan semua unsur, pendidik dan pengelola akan semakin banyak yang didiskusikan yang terkait dengan pemecahan masalah, terutama yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan program lembaga Kursus dan Pelatihan.

Faktor eksternal *pertama* yang menjadi pendukung pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan adalah dukungan biaya dari pemerintah. Pembiayaan merupakan hal penting dalam terselenggaranya suatu program pembelajaran, oleh sebab itu tanpa biaya yang cukup maka akan mempengaruhi kualitas layanan yang dapat diberikan. Karena dengan biaya yang cukup, maka dapat dimanfaatkan untuk pengadaan/pembelian berbagai macam sarana dan prasarana pembelajaran/pendidikan. Dapat

melengkapi sarana yang masih kurang, terutama yang terkait langsung dengan penyelenggaraan proses pembelajaran/pelatihan.

Biaya yang diberikan oleh pemerintah merupakan biaya *supporting* untuk mendorong lembaga Kursus dan Pelatihan agar dapat eksis dan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai program yang telah direncanakan. Karena biaya yang diberikan pemerintah terbatas, maka lembaga Kursus diharapkan memiliki sumber-sumber pembiayaan lainnya. Guna mengefektifkan biaya yang ada maka lembaga Kursus dan Pelatihan, diharapkan untuk membuat rencana penggunaan biaya, dengan memperhatikan prioritas pembiayaan.

Faktor eksternal yang *kedua* yang mendukung pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan adalah bertambahnya lembaga kerjasama/kemitraan. Dari pengalaman mengikuti proses akreditasi hingga diperolehnya status lembaga pendidikan terakreditasi, menjadi pengalaman berharga bagi pengelolanya, karena melalui proses kegiatan akreditasi mereka mengetahui berbagai kelemahan yang ada di lembaga pendidikannya, khususnya yang terkait dengan perlunya menjalin kerjasama/kemitraan dengan berbagai lembaga/organisasi/instansi. Kerjasama dengan pihak lain dibutuhkan, untuk terciptanya keharmonisan dan relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, Lembaga kursus membutuhkan tempat magang dan praktek kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sementara DUDI membutuhkan luaran dari lembaga pendidikan. Jadi untuk kerjasama yang diciptakan harus saling menguntungkan.

Kesadaran dari lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi untuk menambah dan memperluas mitra kerjasama membuat pengelola lembaga pendidikan menjadi lebih bersemangat dan memiliki peluang untuk memperluas dan menambah program-program pembelajarannya. Dengan demikian, semakin maju dan berkembang lembaga Kursus dan Pelatihan, maka tata kelolanya semakin baik dan lebih professional pula.

Faktor eksternal yang *ketiga* yang mendukung pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan adalah bertambahnya animo warga masyarakat menjadi peserta dalam kegiatan pembelajaran/pelatihan. Meluasnya informasi ke masyarakat tentang adanya lembaga Kursus dan Pelatihan yang terakreditasi menjadi promosi tersendiri bagi lembaga pendidikan tersebut. Warga masyarakat yang sudah mulai percaya tentang jaminan mutu yang dimiliki oleh lembaga Kursus dan Pelatihan yang sudah terakreditasi, sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi warga masyarakat untuk masuk atau memasukkan keluarganya untuk menimba ilmu atau mendapatkan pelatihan keterampilan tertentu yang sesuai dengan dunia kerja.

Meningkatnya jumlah peserta kursus dan pelatihan membawa konsekuensi tersendiri untuk mengembangkan kualitas pembelajaran/pelatihan dan kualitas pengelolaannya.

Bagian terpenting dari pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan yang harus terus dibenahi dan ditingkatkan adalah menata kelola peserta didik, sarana pendukung pembelajaran/pelatihan dan kurikulum yang harus selalu dilakukan peninjauan agar tetap relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Meningkatnya jumlah peserta didik, harus diikuti oleh pengelolaan yang lebih baik dan profesional oleh pengelola lembaga pendidikan, agar warga masyarakat tidak dibuat kecewa, dan bagi peserta yang telah mendapatkan layanan pendidikan bermutu, akan menjadi promosi tersendiri kepada warga masyarakat lain, karena adanya penyebaran informasi baik langsung maupun tidak langsung, dengan melihat luaran lembaga pendidikan tersebut dapat bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan, dapat juga menjadi faktor penghambat atau kendala. Tergantung dari sudut pandang melihat faktor-faktor tersebut. Jika ada/cukup memadai dapat menjadi pendukung, sebaliknya jika tidak ada/kurang maka dapat menjadi faktor

penghambat atau kendala dalam pengelolaan, Selanjutnya, dikemukakan bahasan mengenai faktor-faktor penghambat/kendala dalam uraian berikut.

Faktor internal *pertama*, yang menjadi kendala pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan adalah kurangnya pendidik profesional, Lembaga Pendidikan yang sudah mulai berkembang dan sudah mulai menambah program pembelajaran/pelatihannya, akan diperhadapkan dengan problem baru yaitu mencari atau mengangkat pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Mencari dan mengangkat tenaga profesional sesuai kualifikasi yang disyaratkan bukanlah pekerjaan mudah bagi pengelola lembaga pendidikan.

Faktor internal *kedua*, yang menjadi kendala mengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah kurangnya sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang cukup dilihat dari segi jumlah dan kualitasnya dimiliki lembaga pendidikan tentunya akan sangat menunjang proses pembelajaran/pelatihan yang diselenggarakan, namun sebaliknya, jika sarana dan prasarana kurang apalagi kualitasnya kurang baik atau sudah ketinggalan jaman, maka dapat dipastikan proses pembelajaran/pelatihan tidak akan berjalan lancar dan maksimal, dan akan berdampak pada luaran pendidikan yang kurang berkualitas pula.

Berkembangnya lembaga Kursus dan Pelatihan, yang ditandai dengan semakin banyak peserta yang ikut kegiatan pembelajaran/pelatihan dan terbukanya beberapa program pembelajaran/pelatihan di lembaga Kursus dan Pelatihan, maka membawa konsekuensi bagi pengelolanya untuk menambah sarana dan prasarana yang ada, agar dapat memenuhi kebutuhan peserta dan tuntutan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang cukup, maka pengelola lembaga Kursus dan Pelatihan harus berusaha untuk melakukan pengadaan, baik dengan membuat sendiri maupun membeli. Kemitraan dengan sesama lembaga Kursus dan Pelatihan,

dengan dunia usaha dan dunia industri, merupakan upaya sering dan saling membantu, terutama dalam pemanfaatan sarana laboratorium, sarana tempat praktek kerja, dan magang. Juga dapat bekerjasama dengan lembaga donor untuk dapat mensuplay barang/peralatan dan bantuan pembiayaan, sementara lembaga donor mendapatkan keuntungan dari pengelola lembaga Kursus dan Pelatihan dalam menggunakan luaran lembaga Kursus dan Pelatihan yang berkualitas untuk bekerja di perusahaan atau dunia usaha yang dimiliki, sebagai bagian dari komitmen yang telah dibangun bersama.

Faktor internal *ketiga*, yang menjadi kendala pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah belum adanya lembaga pemandirian yang dimiliki lembaga Kursus dan Pelatihan. Lembaga pemandirian yang dimaksudkan dalam hal ini dapat berupa unit usaha produktif. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ingin berkembang, tidak perlu menggantungkan terus pembiayaannya kepada pemerintah dan lembaga donor yang ada, akan tetapi suatu waktu pengelola harus berani keluar dari ketergantungan pembiayaan tersebut, Pengelola harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk menciptakan suatu usaha pemandirian, dengan cara membuat usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Pembiayaan selain yang diperoleh dari peserta didik, juga diperoleh dari keuntungan usaha. Pemandirian lain yang dapat diciptakan oleh pengelola adalah dengan memperbaiki kualitas layanan dan kualitas luaran, sehingga warga masyarakat akan tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran/pelatihan, dan tidak keberatan membayar uang pengelolaan/sumbangan pendidikan yang agak mahal, sehingga pengelola lembaga Kursus dan Pelatihan dapat memperoleh keuntungan untuk digunakan sebagai insentif pengelola dan tenaga pendidik, serta menambah sarana dan prasarana pendidikan/pelatihan.

Faktor internal *pertama*, yang menjadi kendala pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Keterlambatan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Hampir semua

orang mengetahui bahwa jalur pendidikan nonformal, termasuk kursus dan pelatihan anggaran yang disiapkan pemerintah termasuk rendah, jika dibandingkan dengan anggaran untuk mendukung satuan/lembaga pendidikan formal (persekolahan). Anggaran yang kurang tersebut, kadang-kadang pengucurannya terlambat diterima oleh pengelola lembaga pendidikan, bahkan ada yang dikucurkan menjelang akhir tahun. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan lembaga pendidikan, karena pembelajaran yang mengandalkan pembiayaan tersebut waktunya molor, sementara pertanggung jawaban operasional anggaran harus dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

Kekurangan dan keterlambatan pengucuran bantuan dana pendidikan, merupakan tantangan tersendiri, sehingga lembaga Kursus dan Pelatihan dimasa depan adalah bagaimana menggali, menggerakkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat yang memiliki kemampuan, seperti pengusaha, industriawab, untuk mendukung pembiayaan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Menggantungkan diri pada anggaran pemerintah bukan menjadi pilihan, karena diketahui masih terpaku pada jalur persekolahan. Karena itu, perlu dicari cara dan strategi mengerahkan dana masyarakat tersebut untuk mendukung program pendidikan nonformal, termasuk lembaga Kursus dan Pelatihan.

Faktor internal *kedua*, yang menjadi kendala pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan adalah banyaknya tumbuh lembaga Kursus dan Pelatihan yang memiliki program pembelajaran yang sama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat bagaikan arus yang terus mengalir yang dapat menghanyutkan apa saja yang menghalanginya. Arus ini secara otomatis mempengaruhi tuntutan kebutuhan belajar dan kebutuhan pasar terhadap pengembangan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, tantangan lembaga Kursus dan pelatihan adalah bagaimana membuat dan menyelenggarakan program

pembelajaran/pelatihan yang selalu sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat dan tuntutan pasar kerja/ dunia usaha dan dunia industri, serta mampu memberikan makna yang optimal bagi kehidupan warga belajar.

Banyaknya tumbuh dan berkembang lembaga Kursus dan Pelatihan di masyarakat merupakan wujud dari kesadaran warga masyarakat (sebagai pemerakarsa/pengelola) untuk memenuhi kebutuhan belajar warga masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai tuntutan jaman. Juga disebabkan karena warga masyarakat (terutama luaran pendidikan sekolah dan kaum muda putus sekolah) semakin menyadari pentingnya pendidikan/pelatihan keterampilan, untuk bekal bekerja. Ketertarikan terhadap lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai salah satu alternatif untuk mencari bekal ilmu pengetahuan/keterampilan, menjadi peluang tersendiri bagi warga masyarakat untuk mendirikan dan mengelola lembaga Kursus dan pelatihan yang baru dan diyakini dapat diminati oleh warga masyarakat.

Faktor internal *ketiga*, yang menjadi kendala pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan adalah sulitnya menjalin lembaga mitra/kerjasama dalam hal pemagangan peserta didik. Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan nonformal hanya dapat terselenggara karena dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. Pendidikan nonformal, termasuk lembaga Kursus dan pelatihan hendaknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, agar saling sering informasi dan saling membantu mewujudkan luaran pembelajaran/pelatihan yang berkualitas.

Dalam menjalin kerjasama, perlu diperhatikan bahwa kerjasama harus tidak merubah posisi dan status organisasi yaitu berjuang untuk anggotanya, sedangkan pengembangan lembaga Kursus dan Pelatihan menjadi bagian dari program mereka dalam pengabdianya pada masyarakat. Kerjasama yang

dibangun harus saling menguntungkan dan tidak boleh mencampuri urusan dalam lembaga masing-masing. Kesulitan lembaga Kursus dan Pelatihan dalam menjalin hubungan kerjasama/kemitraan, penyebabnya antara lain, bahwa kurangnya kemampuan pengelola dalam melobby dan bernegosiasi dengan pihak calon mitra, dan kurangnya pengetahuan calon mitra dengan keberadaan dan kompetensi luaran yang dihasilkan lembaga Kursus dan Pelatihan. Oleh sebab itu, jika kerjasama/kemitraan ingin diperbanyak dan ditingkatkan maka pengelola lembaga Kursus dan Pelatihan harus rajin mempromosikan lembaganya melalui berbagai cara, melalui media massa (online), web site, dan pertemuan-pertemuan yang mengagendakan promosi pendidikan lainnya.

Kualitas pengelolaan lembaga Kursus dan pelatihan setelah mendapatkan status terakreditasi semakin baik dan meningkat. Kenyataan ini dapat menjadi informasi yang positif bagi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), bahwa proses akreditasi sampai penetapan status akreditasi yang diselenggarakan memiliki dampak positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan lembaga Kursus dan pelatihan. Hal ini mengandung makna yang lain, bahwa akreditasi bagi sebuah lembaga pendidikan adalah moment penting bagi bangkit dan berkembangnya lembaga pendidikan tersebut,

Bagi lembaga Kursus dan Pelatihan, mengikuti proses akreditasi menjadi bagian dari evaluasi diri pengelolaan lembaganya, beberapa kekurangan yang ada dapat diperbaiki, dan beberapa kelebihan lainnya dapat dipelihara dan ditingkatkan. Dalam pemikiran positif, lembaga Kursus dan Pelatihan yang belum terakreditasi sejatinya mengikuti jejak lembaga yang sudah mendapatkan status akreditasi, dengan mengajukan permohonan akreditasi.

Upaya-upaya untuk mewujudkan pengelolaan dan luaran lembaga Kursus dan Pelatihan yang bermutu, menjadi tuntutan karena merupakan kebutuhan masyarakat. Yang

dimaksud bermutu dalam pendidikan nonformal adalah sesuai dengan tuntutan matapencapaian yang akan dikerjakan, sehingga warga belajar yang telah menyelesaikan satu program pembelajaran mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja (dunia usaha dan dunia industri) dan memiliki daya saing yang tinggi. Lembaga Kursus dan Pelatihan diharapkan tidak hanya mendidik warga belajar untuk mengetahui sesuatu (*knowing*), tetapi untuk mampu mengelola lingkungannya, untuk mampu berbuat (*doing*).

Apabila lembaga Kursus dan Pelatihan ingin dicari, dicintai dan dirindukan oleh masyarakat maka dari sejumlah faktor pendukung (peluang) dan kendala (tantangan) yang dibahas dalam uraian sebelumnya, maka harus dicari strategi dan cara bagaimana membuat program di lembaga Kursus dan pelatihan agar memiliki keunggulan bersaing (*competitive advantage*) dengan program pendidikan lainnya dan bagaimana membuat keunggulan tersebut menjadi ciri khas (*trade mark*) yang dapat dipercaya. Pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan yang berkualitas akan menghasilkan luaran yang berkualitas pula.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan: (1) terdapat peningkatan kualitas pengelolaan lembaga Kursus dan Pelatihan di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mendapat status terakreditasi tahun 2017. (2) Faktor Pendukung Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan meliputi (a) motivasi dan semangat semua pengelola di Lembaga Kursus dan Pelatihan untuk lebih baik dari kondisi sebelum mendapatkan status terakreditasi; (b) bertambahnya tenaga pendidik (fasilitator/instruktur/pelatih); (c) bertambahnya sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan; (d) meningkatnya kompetensi pengelola LKP setelah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan manajemen dan workshop; (e) bertambahnya frekuensi pertemuan antara pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk membahas permasalahan dan pengembangan LKP; (f) dukungan biaya dari pemerintah untuk membiayai operasional kegiatan pembelajaran dan insentif

pendidik dan tenaga kependidikan; (g) bertambahnya lembaga kerjasama/kemitraan; dan (h) bertambahnya animo warga masyarakat menjadi peserta dalam kegiatan pembelajaran/pelatihan. (3) Faktor penghambat (kendala) Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan meliputi (a) kekurangan tenaga pendidik profesional sesuai kebutuhan; (b) kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan; (c) kekurangan pembiayaan untuk mendukung biaya operasional dan insentif tenaga pendidik; (d) belum mampu merealisasikan lembaga pemandirian LKP (usaha produktif) yang dapat membiayai program pembelajaran/pelatihan; (e) keterlambatan dukungan pembiayaan dari pemerintah saat dibutuhkan untuk mendukung program pembelajaran/pelatihan; (f) banyaknya tumbuh LKP yang memiliki program pembelajaran yang sama; dan (g) sulitnya menjalin lembaga mitra/kerjasama dalam hal pemagangan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- BAN PAUD dan PNF, 2014, *instrumen Akreditasi Kursus dan Pelatihan*, Jakarta
- Masruhu, M. 2007. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Tangerang: Lentera Hati
- Pidarta, Made. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sagala, Syaiful, 2009. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sihombing, Umberto, 1999, *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*, Jakarta: PD. Mahkota
- , 2000, *Pendidikan Luar Sekolah: Manajemen Strategi*, Jakarta: PD. Mahkota
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Sudjana, H.D., 1991, *Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah perkembangan*,



Falsafah, dan Teori Pendukung azas,
Bandung: Nusantara Press

-----, 1992, *Pengantar Manajemen Pendidikan Luar Sekolah,* Bandung: Nusantara Press

Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis.* Jakarta: Rineka Cipta

=====, 2009. *Membenahi Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 Perubahan Kedua dari Standar Nasional Pendidikan

Zuriah, Nurul, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi,* Jakarta: PT. Bumi Aksara.